

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan akuntabilitas kinerja di sektor pemerintahan merupakan langkah penting dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang akuntabel terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan akses informasi yang lebih luas. Pemerintah di berbagai tingkatan dituntut untuk menunjukkan hasil nyata dari pengelolaan anggaran, termasuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran (Sørensen & Torfing, 2021)

Namun, berbagai laporan audit menunjukkan adanya kesenjangan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang menegaskan perlunya peningkatan sistem informasi dan pengelolaan anggaran yang lebih baik (BPK, 2023). Kondisi ini memperkuat pentingnya penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SIA memainkan peran penting dalam memudahkan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan di sektor publik. Dengan sistem yang terstruktur, informasi keuangan dapat diakses lebih cepat dan tepat waktu,

mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Teguh Setiawan Wibowo et al., 2023). Selain meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, SIA juga membantu mengurangi potensi kesalahan dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Di Provinsi Jambi, penerapan Anggaran Berbasis Kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan mengaitkan setiap pengeluaran dengan pencapaian target kinerja. Berdasarkan penelitian (Wardani & Dewi, 2022), keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi atau sistem yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi aparatur sipil negara. Pegawai yang termotivasi cenderung memiliki dorongan untuk mencapai target yang lebih tinggi, sehingga memengaruhi akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021–2023, terdapat tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja operasional dan modal. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan SIA yang baik telah berkontribusi signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi mencerminkan efektivitas pengelolaan aset dan kekayaan daerah yang lebih baik melalui implementasi SIA (Priscilla et al., 2022a). Tabel 1.1 menunjukkan gambaran detail realisasi pendapatan Provinsi Jambi selama tiga tahun terakhir. Misalnya, PAD meningkat dari Rp 1.843,43 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 2.259,69 juta pada tahun 2023. Peningkatan didorong oleh kenaikan penerimaan pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan perusahaan milik daerah.

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2023
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Persentase 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Persentase 2022	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase 2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,934.17	1,843.43	95.31%	2,271.76	2,163.59	95.24%	2,372.67	2,259.69	95.24%
1.1 Pajak Daerah	1,635.09	1,558.11	95.29%	1,965.43	1,871.84	95.24%	2,013.41	1,917.53	95.24%
1.2 Retribusi Daerah	13.24	12.62	95.28%	17.71	16.87	95.24%	27.18	25.88	95.24%
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah	29.44	28.03	95.20%	32.14	30.61	95.24%	36.94	35.18	95.24%
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	256.10	244.68	95.53%	256.48	244.27	95.24%	295.15	281.09	95.24%
Pendapatan Transfer	3,014.56	2,879.98	95.53%	2,653.65	2,527.28	95.24%	2,751.09	2,620.88	95.24%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.19	2.31	14.29%	15.46	14.72	95.24%	30.93	28.51	95.24%
Jumlah Total	5,263.78	4,725.72	89.74%	4,940.87	4,705.59	95.24%	5,154.53	4,909.07	95.24%

Sumber: Jambi dalam angka, 2024

Belanja operasional dan belanja modal juga mencatat pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2021, belanja pegawai mencapai Rp 1.500,2 juta meningkat menjadi Rp 1.559,8 juta pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan komitmen untuk mendukung kesejahteraan pegawai, yang berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan akuntabilitas kinerja. Hal serupa juga terjadi pada belanja barang dan jasa, yang menunjukkan peningkatan dari Rp 770,7 juta pada 2021 menjadi Rp 1.403,2 juta pada 2023.

Tabel 1.2 menyajikan detail realisasi belanja Provinsi Jambi, menyoroti pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel.

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Menurut Jenis Belanja Tahun 2021–2023 (Dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Persentase 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Persentase 2022	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase 2023
Belanja Operasi	3,080.5	3,075.4	99.84%	3,080.5	2,933.8	95.24%	3,232.4	3,078.4	95.24%
1.1 Belanja Pegawai	1,585.7	1,500.2	94.61%	1,585.7	1,510.2	95.24%	1,637.8	1,559.8	95.24%

Jenis Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Persentase 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Persentase 2022	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase 2023
1.2 Belanja Barang dan Jasa	1,220.7	770.7	63.15%	1,274.8	1,214.1	95.24%	1,473.4	1,403.2	95.24%
1.4 Belanja Subsidi	1.0	0.6	55.00%	1.3	1.2	95.24%	0.6	0.6	95.24%
1.5 Belanja Hibah	800.8	777.7	97.10%	200.8	191.2	95.24%	114.5	109.1	95.24%
Belanja Modal	950.6	449.7	47.30%	906.8	906.8	100.00%	910.5	910.5	100.00%
Belanja Tidak Terduga	6.0	51.9	865.00%	10.0	6.9	69.00%	500.0	402.7	80.50%
Belanja Transfer	1,000.3	811.3	81.00%	1,000.0	925.2	92.52%	1,200.0	1,110.0	92.50%
Jumlah Total	7,500.4	4,500.0	60.00%	6,529.8	4,772.6	73.10%	7,521.0	5,501.6	73.12%

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2024

Peningkatan signifikan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi telah terlihat dalam dua tahun terakhir. Data ini menunjukkan bagaimana Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan anggaran berbasis kinerja berkontribusi pada pengelolaan belanja yang lebih efektif, dengan fokus pada peningkatan kinerja melalui penggunaan anggaran yang lebih transparan dan terukur. Peningkatan signifikan dalam belanja operasional dan modal, terutama untuk belanja pegawai, barang, dan jasa, mengindikasikan bahwa pengelolaan berdasarkan sistem informasi akuntansi mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jambi (MenPan, 2023).

Provinsi Jambi memperoleh predikat BB (Kinerja cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan dalam beberapa aspek) oleh KemenPAN-RB selama evaluasi tahun 2021, yang menempatkan provinsi ini dalam kategori cukup baik. Pada tahun 2022, Provinsi Jambi mempertahankan skor 67,37, yang menunjukkan konsistensi dalam implementasi manajemen kinerja dan penggunaan anggaran berbasis kinerja. Namun, pada tahun 2023, skor menurun menjadi 1,88, yang

mengindikasikan adanya penurunan signifikan dalam kinerja dan efektivitas kebijakan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tata kelola dan akuntabilitas telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun sebelumnya, diperlukan evaluasi dan upaya lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab penurunan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di masa depan (KemenPAN-RB, 2023).

Evaluasi SAKIP pada tahun 2023 menitikberatkan program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah. Fokus ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai kemampuan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jambi, dalam mengelola program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun evaluasi ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan program secara akuntabel dan efisien, data terbaru menunjukkan adanya tantangan signifikan. Skor akuntabilitas Provinsi Jambi menurun pada tahun 2023 menjadi 1,88, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam implementasi kebijakan dan efisiensi tata kelola. Penurunan ini menyoroti kebutuhan untuk mengevaluasi kembali pendekatan dan strategi yang telah diterapkan serta memperkuat reformasi birokrasi yang konsisten. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas tata kelola, khususnya dalam transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetap menjadi prioritas yang perlu diperkuat agar momentum perbaikan di masa mendatang dapat tercapai. Dengan demikian, optimalisasi sistem informasi akuntansi dan

manajemen anggaran berbasis kinerja harus terus didorong untuk mengembalikan dan meningkatkan kinerja akuntabilitas.

Data ini menunjukkan bahwa SIA dan anggaran berbasis kinerja berkontribusi pada pengelolaan belanja yang lebih efektif, dengan penekanan pada peningkatan kinerja melalui penggunaan anggaran yang transparan dan terukur. Peningkatan belanja operasional dan modal yang signifikan, terutama dalam hal belanja pegawai, barang, dan jasa, merupakan indikasi bahwa pengelolaan yang didasarkan pada sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jambi (Priscilla et al., 2022b).

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan tidak hanya bergantung pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Anggaran Berbasis Kinerja, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya. Kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem dan pemahaman strategis terhadap pengelolaan keuangan publik menjadi faktor utama dalam memastikan efektivitas sistem yang diterapkan. (Sari & Darmawan, 2021) menekankan bahwa kompetensi teknis SDM dalam mengelola SIA sangat menentukan kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan berbasis data. (Mujib & Fadhilah, 2021) menambahkan bahwa keahlian di bidang keuangan dan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi organisasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penerapan SIA tidak hanya harus diimplementasikan, tetapi juga dioptimalkan secara berkelanjutan. Analisis keuangan dan perencanaan strategis memungkinkan pegawai untuk menginterpretasikan data dari sistem menjadi

kebijakan yang lebih efektif (Putra & Santoso, 2020). Kemampuan dalam menghadapi tantangan teknis serta menjaga keakuratan data juga menjadi aspek yang krusial. Namun, kendala utama yang dihadapi Provinsi Jambi adalah keterbatasan kompetensi SDM serta ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan keuangan daerah.

Laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah menunjukkan tren positif, tetapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencatat penurunan skor signifikan di Provinsi Jambi pada tahun 2023, yang menunjukkan hambatan dalam integrasi antara sistem, kebijakan, dan SDM untuk meningkatkan akuntabilitas. SIA telah diterapkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kualitas SDM yang mengoperasikannya (Sari & Darmawan, 2021).

Motivasi pegawai juga berperan penting dalam mendukung implementasi teknologi dan kebijakan pengelolaan keuangan. Wardani & Dewi (2022) menemukan bahwa pegawai dengan tingkat motivasi tinggi lebih proaktif dalam memanfaatkan SIA dan menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. (B. Nguyen & Canh, 2021a) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa motivasi intrinsik pegawai berpengaruh signifikan dalam meningkatkan keterlibatan mereka terhadap teknologi informasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Namun, penerapan SIA di berbagai dinas di Provinsi Jambi masih belum merata. Dinas Pendidikan berhasil mencapai target dalam akses pendidikan menengah, sementara Dinas ESDM masih mengalami kendala dalam optimalisasi anggaran energi. Teguh Setiawan Wibowo et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan SIA sangat bergantung pada kompetensi SDM, sementara (Sumaryati et al., 2020) menemukan bahwa penerapan SIA tidak berdampak signifikan jika tidak didukung oleh SDM yang kompeten. Ketimpangan ini menegaskan bahwa pelatihan berkelanjutan dan motivasi pegawai menjadi elemen kunci dalam optimalisasi sistem akuntansi dan anggaran berbasis kinerja.

Penelitian mengenai pengaruh penerapan SIA terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan dengan hasil yang beragam. Sumaryati et al. (2020) menemukan bahwa penerapan SIA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Wardani & Dewi (2022) justru menunjukkan hasil yang berbeda, di mana implementasi SIA berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sidoarjo. (Hama & Qurochman, 2022) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa penerapan SIA yang dikombinasikan dengan teknologi informasi mampu meningkatkan kinerja karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas organisasi. Beragamnya hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SIA dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja sangat bergantung pada faktor lain, seperti kompetensi SDM dan sistem pengelolaan organisasi.

Selain SIA, Anggaran Berbasis Kinerja juga memiliki dampak terhadap akuntabilitas kinerja. (Mujennah et al., 2019) menemukan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja, pelaporan anggaran, dan kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. (Wahdatul et al., 2021) menemukan bahwa anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah Kabupaten Bekasi. Sejalan dengan temuan tersebut, Wardani & Dewi (2022) juga menegaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja di Kabupaten Sidoarjo.

Keberhasilan penerapan SIA dan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja sangat bergantung pada kompetensi SDM. Sumaryati et al. (2020) menemukan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teguh Setiawan Wibowo et al. (2023) juga menyatakan bahwa akuntabilitas dan SIA memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi, sedangkan sistem pengendalian internal tidak memberikan dampak yang signifikan. (Pratolo et al., 2020) menambahkan bahwa kompetensi manajemen berkontribusi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi.

Berbagai penelitian sebelumnya belum banyak mengeksplorasi peran motivasi pegawai sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penerapan SIA, Anggaran Berbasis Kinerja, dan akuntabilitas kinerja. (Lee, 2019a) menegaskan bahwa motivasi intrinsik pegawai berpengaruh terhadap keterlibatan

mereka dalam penggunaan teknologi informasi serta pengambilan keputusan berbasis data. Celah penelitian yang masih terbuka adalah bagaimana motivasi pegawai dapat memperkuat atau justru melemahkan dampak penerapan SIA dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam konteks dinas-dinas di Provinsi Jambi. Eksplorasi lebih lanjut dilakukan untuk memahami peran motivasi pegawai sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penerapan SIA dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas-dinas di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas-dinas di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas-dinas di Provinsi Jambi?

4. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja yang dimoderasi oleh motivasi pegawai pada dinas-dinas di Provinsi Jambi?
5. Bagaimana pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas kinerja yang dimoderasi oleh motivasi pegawai pada dinas-dinas di Provinsi Jambi?
6. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas kinerja yang dimoderasi oleh motivasi pegawai pada dinas-dinas di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas kinerja, dengan motivasi pegawai sebagai variabel moderasi di dinas-dinas Provinsi Jambi. Secara khusus, tujuan ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas-dinas di Provinsi Jambi.
2. Menganalisis pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas-dinas di Provinsi Jambi.
3. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas-dinas di Provinsi Jambi.
4. Menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja yang dimoderasi oleh motivasi pegawai pada dinas-dinas di Provinsi Jambi.

5. Menganalisis pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas kinerja yang dimoderasi oleh motivasi pegawai pada dinas-dinas di Provinsi Jambi.
6. Menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas kinerja yang dimoderasi oleh motivasi pegawai pada dinas-dinas di Provinsi Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah serta memberikan kontribusi pengetahuan khususnya mengenai pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Anggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas kinerja dengan motivasi pegawai sebagai variabel moderasi di dinas-dinas Provinsi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait peran SIA dan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta bagaimana motivasi pegawai dapat memperkuat hubungan ini.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna bagi dinas-dinas di Provinsi Jambi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka. Hasil penelitian ini dapat membantu manajemen pemerintahan daerah dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, sekaligus memahami pentingnya motivasi pegawai dalam memperkuat kinerja organisasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan teknologi informasi dan anggaran berbasis kinerja

yang tepat dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk pengembangan lebih lanjut. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi dasar bagi studi lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Akuntansi, anggaran berbasis kinerja, dan kompetensi sumber daya manusia serta peran motivasi pegawai dalam meningkatkan akuntabilitas di sektor pemerintahan lainnya, baik di tingkat lokal maupun nasional.